

**DAMPAK KERUSUHAN MALUKU
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI *STAKEHOLDER*
PENDUKUNG KEGIATAN PARIWISATA PANTAI NAMALATU
KOTA AMBON**

TUGAS AKHIR

Oleh:

RATNA DEWI SRIKANDI

L2D 001 455



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

ABSTRAKSI

Pariwisata merupakan sektor yang berkaitan erat dengan aspek sosial ekonomi dengan salah satu tujuan kegiatan pengembangan pariwisata daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penggalan potensi pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di obyek wisata. Namun untuk mewujudkan hal tersebut sampai saat ini masih mengalami hambatan. Salah satu hambatan tersebut adalah masalah keamanan.

Konflik Maluku yang terjadi pada 19 Januari 1999 merupakan salah satu konflik sosial horisontal terbesar yang memunculkan berbagai pengaruh negatif dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Maluku dan menambah beban pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Kota Ambon yang selama ini terkenal dalam bidang pariwisata, ternyata ikut mengalami keterpurukan akibat gejala sosial yang berkepanjangan ini. Hilangnya rasa aman dan nyaman akibat kerusuhan di daerah ini, memaksa Kota Ambon dihindari sejenak oleh para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Sebagai salah satu obyek wisata di Kota Ambon yang terkena dampak kerusuhan Maluku, Pantai Namalatu ini mengalami penurunan kunjungan wisatawan karena Desa Latuhalat yang merupakan lokasi pantai Namalatu merupakan daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi saat kerusuhan Maluku terjadi.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah perubahan kondisi sosial ekonomi stakeholder pendukung kegiatan pariwisata Pantai Namalatu sebagai dampak kerusuhan Maluku? Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh stakeholder untuk meningkatkan kembali kondisi sosial ekonominya sebagai dampak dari kerusuhan Maluku? Untuk itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dampak kerusuhan Maluku terhadap kondisi sosial ekonomi stakeholder pendukung kegiatan pariwisata Pantai Namalatu.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Wawancara dilakukan dengan pendekatan langsung dan snowballing. Pada pendekatan snowballing, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel menurut ciri spesifik yang dimiliki sampel tersebut. Kemudian data diolah pada tahap pengkodean dan kategorisasi data, serta tahap verifikasi. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif dan kualitatif komparatif. Tahap analisis yang dilakukan meliputi analisis kondisi sosial ekonomi stakeholder pendukung kegiatan pariwisata Pantai Namalatu pada waktu pra dan pasca kerusuhan Maluku, yang kemudian dijadikan input untuk analisis dampak kerusuhan Maluku terhadap kondisi sosial ekonomi stakeholder pendukung kegiatan pariwisata Pantai Namalatu, analisis pengaruh aspek keamanan terhadap pengembangan pariwisata Pantai Namalatu, serta analisis upaya stakeholder untuk meningkatkan kembali kondisi sosial ekonominya sebagai dampak dari kerusuhan Maluku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kerusuhan Maluku terhadap kondisi sosial ekonomi stakeholder pendukung kegiatan pariwisata Pantai Namalatu ini adalah terjadinya penurunan pendapatan yang berakibat pada terhambatnya pengembangan pariwisata pantai Namalatu, dan kerenggangan hubungan sosial masyarakat yang berakibat pada keengganan masyarakat dalam berwisata terutama ke pantai Namalatu. Upaya yang dilakukan oleh stakeholder untuk meningkatkan kembali pendapatannya dari kegiatan pariwisata pantai Namalatu ini adalah melalui upaya peningkatan kunjungan wisatawan pada obyek wisata pantai Namalatu, sedangkan untuk mempererat kembali hubungan sosial masyarakatnya akibat kerusuhan Maluku lebih diarahkan pada upaya pembauran masyarakat yang berkonflik.

Untuk mengembalikan dan meningkatkan kembali kondisi sosial ekonomi stakeholder pendukung kegiatan pariwisata Pantai Namalatu pada pasca kerusuhan Maluku ini, upaya utama yang harus dilakukan adalah meningkatkan peran serta masyarakat Desa Latuhalat, baik dalam pengelolaan pantai Namalatu maupun dalam upaya pengamanan di daerah wisata Pantai Namalatu itu sendiri. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk kerja sama antara Dinas Pariwisata Tingkat I Maluku dengan masyarakat Desa Latuhalat untuk menciptakan kondisi berwisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi, dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan terutama ke obyek wisata Pantai Namalatu.

Key words: Kerusuhan, Stakeholder, Pariwisata Pantai

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Selain itu, pariwisata juga berhubungan erat dengan aspek kehidupan masyarakat seperti politik, keamanan, dan sebagainya sehingga dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata biasanya berupa dampak terhadap sosial-ekonomi, sosial budaya, dan dampak terhadap lingkungan (Pitana, dkk: 2004: 109).

Secara ekonomis, salah satu tujuan kegiatan pengembangan pariwisata daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penggalan potensi pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di obyek wisata. Namun untuk mewujudkan hal tersebut sampai saat ini masih mengalami hambatan, yang mana salah satu hambatan tersebut adalah masalah keamanan.

Keamanan merupakan salah satu faktor pendukung berhasil tidaknya suatu pengembangan pariwisata di suatu wilayah. Tidak adanya jaminan keselamatan dan keamanan di suatu daerah tujuan wisata, maka kemungkinan besar tidak akan ada wisatawan yang mau berkunjung ke daerah tersebut. Kerusakan merupakan salah satu penyebab ketidak-amanan dalam berwisata di suatu daerah wisata. Kerusakan yang mengganggu keamanan dapat memberi dampak negatif terhadap perkembangan pariwisata di suatu daerah, seperti rusaknya sarana dan prasarana wisata, menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi pengunjung sehingga pengunjung merasa tidak nyaman berada di lokasi wisata. Contohnya seperti di Maluku. Maluku dengan ibukotanya Ambon merupakan daerah yang faktor keamanannya patut diperhatikan akibat konflik kemanusiaan yang terjadi pada 19 Januari 1999. Kerusakan Ambon yang berlarut-larut telah mengakibatkan kerugian yang tidak ternilai. Jika dibandingkan dengan kerusakan di tempat-tempat lain, kerusakan di Ambon dan sekitarnya merupakan yang terlama dengan kerugian yang terbesar. Hal ini disebabkan karena pola Kerusakan Ambon sama sekali berbeda dengan yang terjadi pada tempat-tempat lainnya di Indonesia, dan faktor pemicunya juga sangat fundamental, serta meliputi banyak variabel (*complicated*).

Salah satu dampak dari kerusakan ini dirasakan pada sektor pariwisata. Kota Ambon yang selama ini terkenal dalam bidang pariwisata, ternyata ikut mengalami keterpurukan akibat gejolak sosial yang berkepanjangan. Hilangnya rasa aman dan nyaman akibat kerusakan di daerah ini,

memaksa Kota Ambon dihindari sejenak oleh para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Pantai Namalatu merupakan salah satu tujuan wisata bahari yang paling sering dikunjungi karena terkenal dengan keindahan alam pesisir/ pantai. Dengan jarak tempuh sekitar 30 menit dari pusat Kota Ambon, Pantai Namalatu merupakan kawasan yang relatif mudah dijangkau. Pantai yang berpasir putih dengan karang-karang yang berwarna coklat gelap yang terlihat bila pasang surut menghiasi laut yang biru bening. Dibalik karang tersebut terdapat kehidupan bawah laut yang indah dengan berjenis ikan, penyu, dan biota laut. Pantai Namalatu ini masih aman dari pengaruh polusi dan memiliki taman laut yang indah sehingga lokasi ini sangat nyaman untuk olah raga pantai, berenang, snorkeling, memancing, dan menyelam.

Sebelum konflik Maluku terjadi, obyek wisata Pantai Namalatu ini sering disinggahi wisatawan mancanegara. Mereka datang untuk menyelam dan menikmati pemandangan bawah laut. Namun keadaan tersebut tidak dapat bertahan lama seiring dengan terjadinya konflik/ kerusuhan yang terjadi pada awal Januari 1999. Keterpurukan dunia pariwisata Maluku jauh lebih dalam daripada Bali atau tempat wisata lain. Secara obyektif, kerusuhan yang terjadi di wilayah ini jauh lebih lama dan berkepanjangan. Penyebab konflik di Maluku dipandang sangat rawan, yaitu masalah SARA.

Sejak kerusuhan melanda Kota Ambon ini, yaitu pada tahun 1999-2001, aktivitas pariwisata di pantai Namalatu ini berhenti total. Kemudian pada tahun 2002 kondisi pariwisata di pantai Namalatu sudah mulai membaik. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan data pengunjung pada obyek wisata pantai Namalatu di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon pra kerusuhan Maluku (1996-1998) dan pasca kerusuhan Maluku (2002-2004) pada tabel I.1.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Tingkat I Propinsi Maluku, diketahui bahwa pra kerusuhan Maluku yaitu pada tahun 1996-1998 mengalami peningkatan jumlah pengunjung pada obyek wisata Pantai Namalatu sekitar 30%. Sedangkan data pasca kerusuhan menunjukkan peningkatan dari tahun 2002 sampai 2004 hanya sekitar 5% tiap tahunnya.

TABEL I.1
JUMLAH PENGUNJUNG PADA OBYEK WISATA PANTAI NAMALATU
PRA DAN PASCA KERUSUHAN MALUKU

	Tahun	Jumlah Pengunjung
Pra Kerusuhan Maluku	1996	41.994
	1997	49.389
	1998	54.886
Pasca Kerusuhan Maluku	2002	29.299
	2003	31.788
	2004	31.577

Sumber : Dinas Pariwisata Tingkat I Propinsi Maluku, 2005

Adanya penurunan jumlah pengunjung pada obyek wisata Pantai Namalatu Kota Ambon ini merupakan salah satu dampak dari kerusuhan Maluku yang terjadi pada 19 Januari 1999 yang tentu saja dengan adanya penurunan jumlah kunjungan pada obyek wisata Pantai Namalatu tersebut secara tidak langsung memberi pengaruh khususnya pada aspek sosial ekonomi pemerintah, swasta, maupun masyarakat sebagai pendukung kegiatan pariwisata Namalatu itu sendiri. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka diperlukan suatu studi untuk mengidentifikasi lebih dalam mengenai dampak kerusuhan Maluku terhadap kondisi sosial ekonomi *stakeholder* pendukung kegiatan pariwisata Pantai Namalatu, serta upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kembali minat wisatawan pada obyek wisata Pantai Namalatu pasca kerusuhan Maluku.

1.2 Rumusan Masalah

Secara umum, pariwisata merupakan sektor yang berkaitan erat dengan aspek sosial ekonomi, dimana dengan adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah, maka secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata tersebut. Sehingga kerusuhan yang mengganggu kegiatan pariwisata dapat berpengaruh pada perekonomian baik perekonomian pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Sebagai salah satu obyek wisata bahari di Kota Ambon yang terkena dampak kerusuhan Maluku, pantai Namalatu ini mengalami penurunan kunjungan wisatawan (lihat tabel I.1). Hal ini disebabkan karena Desa Latuhalat yang merupakan lokasi pantai Namalatu, merupakan daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon (sumber: Kepolisian Daerah Maluku Tengah).

Penurunan kunjungan wisatawan pada pasca kerusuhan Maluku ini secara tidak langsung memberi pengaruh pada pemasukan PAD Kota Ambon, swasta, dan masyarakat pendukung kegiatan pariwisata Pantai Namalatu. Begitu juga halnya yang terjadi pada stabilitas sosial ekonomi masyarakat Maluku yang mengalami penurunan signifikan akibat adanya konflik sosial yang berkepanjangan.

Oleh karena itu penelitian ini untuk menjawab pertanyaan Bagaimanakah perubahan kondisi sosial ekonomi *stakeholder* pendukung kegiatan pariwisata Pantai Namalatu sebagai dampak kerusuhan Maluku? Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh *stakeholder* untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak dari kerusuhan Maluku? Untuk itu diperlukan suatu studi mengenai dampak kerusuhan Maluku terhadap kondisi sosial ekonomi *stakeholder* pendukung kegiatan pariwisata Pantai Namalatu Kota Ambon.